



ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PELAPORAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL REPORTING*)

Faridha Aripianti, Sudarno¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the influence of corporate governance on environmental reporting. Corporate governance structure measured by 4 proxy there are proportion of independent board, institutional ownership, board size, and proportion of female directors. To measure the amount of environmental reporting using the GRI disclosure items. Control variables in this study are firm size as measured by 3 proxy there are total assets, market capitalizations, and operating revenues. Other control variable profitability is measured using ROA (Return on Assets). The population in this study consists of all the entire mining company and basic industry and chemicals listed in BEI in year 2009-2013. The sampling method used in this study is purposive sampling. The criteria of the sample is a company that has an annual report and sustainability report. By doing sampling and processing data, the final amounts of the sample are 47 samples. This study uses linear regression as an analysis technique to examine the hypotheses. The data analysis showed that proportion of independent board have significant positive influence on environmental reporting. Institutional ownership concentration and board size did non significantly affect environmental reporting. While the proportion of female directors have significant negative on environmental reporting.

Keyword: corporate governance, environmental reporting, sustainability report, GRI index.

PENDAHULUAN

Pelaporan informasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan akhir-akhir ini menarik untuk diteliti. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Gibson dan O'Donovan (2007), bahwa ada kecenderungan yang meningkat untuk organisasi di seluruh dunia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungannya. Keinginan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan mereka merupakan salah satu motivasi utama perusahaan untuk melaporkan kegiatan lingkungan yang dilakukannya (Cho dan Patten, 2007). Hal ini dikarenakan pengungkapan pelaporan lingkungan merupakan salah satu alat untuk mendapatkan legitimasi.

Banyak peneliti yang telah mencatat bahwa betapa pentingnya suatu organisasi atau perusahaan untuk mempertimbangkan pengaruh perusahaannya terhadap lingkungan dan penting pula bagi perusahaan untuk mengungkapkan hasil kinerja lingkungannya kepada kelompok yang lebih luas dalam hal ini meliputi para pemangku kepentingan (Deegan, 1994), termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, regulator, media massa, dan pemegang saham (Adams dan Zutshi, 2004). Pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) merupakan salah satu cara penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan. Pelaporan lingkungan adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan perusahaan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Pelaporan kinerja lingkungan tidak hanya membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, tetapi juga akan membantu perusahaan untuk menilai risiko yang mungkin akan terjadi dalam proses operasional perusahaan, dan untuk mengurangi dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan.

¹ *Corresponding author*



Di Indonesia pelaporan lingkungan wajib untuk dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang dijelaskan dalam Bab V Pasal 74, dikatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tata kelola perusahaan dirancang untuk memasukkan mekanisme yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah perilaku manajerial mementingkan dirinya sendiri.

Kegiatan pertambangan adalah salah satu kegiatan yang paling banyak memberikan dampak atau berdampak terhadap lingkungan. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), diperkirakan sekitar 70 persen kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. PT Freeport Indonesia adalah potret nyata buruknya sektor pertambangan di Indonesia.

Selain pertambangan, kegiatan perusahaan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah industri kimia dasar. Menurut Surat Keputusan Menperin No. 19 M/SK/1986, industri kimia dasar adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contoh industri ini yaitu industri kertas, semen, pupuk, selulosa, dan karet. Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri ini yaitu kasus tercemarnya Kali Brantas. Pencemaran Kali Brantas ini disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah cair oleh pabrik kertas PT Tjiwi Kimia.

Penelitian ini akan memberikan gambaran dari literatur sebelumnya yang mengeksplorasi pentingnya pelaporan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan hubungan antara pengungkapan atau pelaporan lingkungan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas struktur tata kelola perusahaan pada pengungkapan yang dilakukan secara sukarela, khususnya berfokus pada pelaporan lingkungannya. Penelitian ini akan menyoroti apakah struktur tata kelola perusahaan berkaitan dengan peningkatan pengungkapan kinerja lingkungan dalam laporan keuangan tahunan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

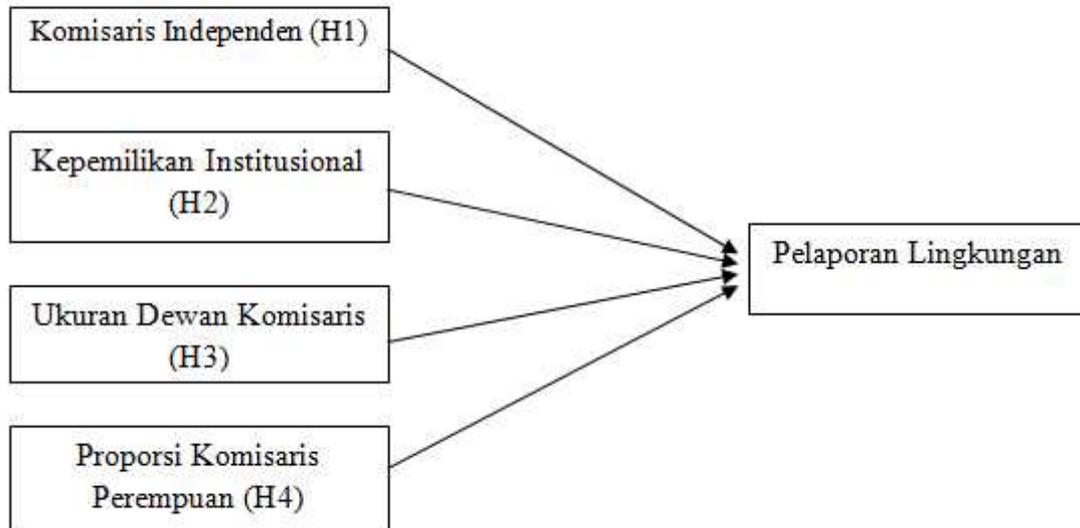
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori legitimasi. *Agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dalam hal ini para *stakeholders* dan manajemen perusahaan sebagai agen. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu orang atau lebih atau yang disebut dengan prinsipal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang yang lain atau lebih yang disebut dengan agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipal. Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara kedua belah pihak, yaitu prinsipal dan agen.

Oleh karena itu, pentingnya membentuk suatu struktur tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar hubungannya dengan pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. Peran GCG dalam hal ini sangat penting karena memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari para pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan kepada pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab agen sebagai manajemen perusahaan.

Teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan tidak akan bertahan jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial, meskipun kinerja keuangannya sudah baik. Hal ini berarti kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada penilaian masyarakat atau publik terhadap perusahaan tersebut. Suatu legitimasi terjadi ketika nilai-nilai yang ada dalam perusahaan sama dengan atau selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ketika terjadi perbedaan antara nilai-nilai yang ada dalam perusahaan dan yang ada dalam masyarakat, maka hal ini lah yang disebut dengan "*legitimacy gap*".

Penelitian ini menguji pengaruh hubungan antara *corporate governance* dengan pelaporan lingkungan atau *environmental reporting*. *corporate governance* diproksikan oleh komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris perempuan sebagai variabel independen, sedangkan pelaporan lingkungan diproksikan sebagai variabel dependen. Variabel kontrol yang diuji adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan tiga proksi yaitu total aset, kapitalisasi pasar, dan *operating revenue*, serta profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Hubungan Komisaris Non-Eksekutif Independen Dan Pelaporan Lingkungan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham penadali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen dapat lebih memantau kinerja manajemen karena posisi non-resmi mereka dalam perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai pemantau ahli yang dapat mencegah perilaku manajemen untuk melakukan tindakan kolusi dengan direksi dalam perusahaan (Carter et al., 2003). Mengacu pada teori agensi, keberadaan komisaris independen dapat mencegah tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan hal-hal yang merugikan investor dan hanya menguntungkan diri sendiri. Banyak penelitian sebelumnya yang telah menyoroti pentingnya komisaris independen dalam perilaku pengungkapan perusahaan baik wajib maupun sukarela (Cahaya et al, 2009).

Menurut De Villiers *et al.* (2009) perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki direksi yang lebih independen. Komisaris independen akan lebih meningkatkan transparansi dewan dalam perusahaan dan secara sukarela akan mengungkapkan informasi tambahan (Chen dan Jaggi, 2000). Dewan komisaris yang lebih mandiri atau independen lebih mungkin untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pelaporan lingkungan akan cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh positif komisaris non-eksekutif independen terhadap jumlah dari pelaporan lingkungan.

Hubungan Kepemilikan Institusional Dan Pelaporan Lingkungan

Konsentrasi kepemilikan dianggap sebagai aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Shan, 2009). Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Investor besar lebih mungkin untuk mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen (Lau et al., 2009) karena mereka memegang sejumlah besar saham di perusahaan. Sejalan dengan teori legitimasi, dikatakan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan pelaporan tentang CSR lebih banyak agar mendapatkan legitimasi dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Donnelly dan Mulcahy (2008) menemukan hubungan positif antara proporsi saham yang oleh investor institusional dan tingkat pengungkapan sukarela dalam perusahaan.

Namun, sebagian besar studi telah menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan perusahaan (Habib dan Jiang, 2009). Kepemilikan yang terkonsentrasi akan lebih mampu mempengaruhi nilai-nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997). Selanjutnya, Brammer dan Pavelin (2008) menemukan bahwa dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar, perusahaan cenderung untuk mengungkapkan kebijakan lingkungan mereka. Pemegang saham yang kuat sering memiliki pengaruh yang lebih pada keputusan manajemen dan oleh karenanya perusahaan itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap pelaporan lingkungan.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Dan Pelaporan Lingkungan

Ukuran dewan komisaris atau jumlah dewan dalam jajaran dewan komisaris, memainkan peranan penting dalam memantau kinerja dewan. Banyak studi yang meneliti tentang ukuran direksi dan kinerja perusahaan sebelum melakukan studi yang secara langsung berhubungan dengan pengungkapan. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif berkaitan dengan kinerja perusahaan. Direksi yang berukuran kecil lebih efektif dalam memantau tindakan manajemen (De Villiers *et al*, 2009) dan dapat berfungsi secara efektif karena keputusan dalam perusahaan akan lebih mudah diambil (Cheng, 2008).

Penelitian lain menyatakan bahwa papan yang lebih besar lebih efektif karena mereka dapat membawa lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dan akan menawarkan saran-saran yang lebih baik pula (Bonn, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris yang besar dapat dengan mudah mengendalikan manajemen perusahaan dalam bertindak yang merugikan pemangku kepentingan. Namun komisaris dengan jumlah yang lebih besar akan memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya akan kurangnya komunikasi, pengambilan keputusan yang lambat, dan kurangnya kebulatan atau kesepakatan suara yang diambil oleh jajaran komisaris sehingga akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari dewan komisaris itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh negatif ukuran dewan komisaris terhadap pelaporan lingkungan.

Hubungan proporsi komisaris perempuan dan pelaporan lingkungan

Tingkat keragaman di jajaran dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan yang diambil dan kegiatan yang akan dilakukan (Adams dan Ferreira, 2004). Salah satu karakteristik yang diperdebatkan adalah keanekaragaman gender pada jajaran dewan komisaris. Pentingnya keragaman gender tersebut sebagai bentuk reformasi dalam tata kelola perusahaan (Adams dan Ferreira, 2004). Hal ini semakin sering dilihat bahwa perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam jajaran anggota komisaris.

Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih rajin, dalam mengajukan berbagai pertanyaan sehingga mampu menciptakan suasana yang baik dalam rapat komisaris. Perempuan diyakini akan lebih “*aware*” terhadap masalah-masalah

yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan. Teori agensi menjelaskan bahwa dengan adanya perempuan dalam jajaran dean komisaris dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyimpangan dan perusahaan dapat dikelola dengan baik pula. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan partisipasi kehadiran perempuan cenderung lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh positif antara proporsi komisaris perempuan terhadap pelaporan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen penelitian ini adalah *environmental reporting* (pelaporan lingkungan). Pengukuran *corporate social responsibility* (CSR) menggunakan indeks GRI yang berlaku secara internasional yang telah digunakan di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris perempuan. Pengukuran variabel komisaris independen ini menggunakan persentase anggota komisaris independen dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki institusi dari semua saham yang beredar. ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam jajaran dewan komisaris yang diukur menggunakan variabel interval. Proporsi komisaris perempuan ini diukur dengan jumlah perempuan dalam dewan komisaris dibagi dengan total anggota dewan komisaris (Kathyayini Kathy Rao *et al.* 2012).

Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan (*firm size*) dan profitabilitas. Terdapat tiga ukuran yang digunakan dalam pengukuran yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, yaitu total aset, kapitalisasi pasar (*market capitalisation*), dan pendapatan operasional (*operating revenue*). Profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Penggunaan ROA konsisten dengan studi lain yang berbasis pengungkapan (de Villiers *et al.* 2009).

Deskripsi Variabel

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
env_disc	47	0,40	1,00	0,86	0,21
kom_ind	47	0,17	0,58	0,37	0,09
inst_inv	47	18,75	99,00	59,65	28,42
tot_kom	47	3	13	6,64	1,73
p_kom	47	0,00	0,50	0,06	0,11
tot_asst	47	1.835	85.938	22.578,83	21.169,32
mkt_cap	47	1.044	94.015	30.180,09	26.143,11
op_rev	47	1.621	43.517	14.510,51	10.746,58
Prop	47	-0,09	0,46	0,11	0,11

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan output tampilan SPSS diatas, dari jumlah sampel (N) sebesar 47 diketahui variabel proporsi pelaporan lingkungan (ENV_DISC) memiliki nilai minimum sebesar 0,40 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,86 yang berarti bahwa tingkat proporsi pelaporan lingkungan perusahaan sampel yang relatif tinggi.

Variabel independen proporsi komisaris independen (KOM_IND) memiliki nilai minimum 0,17 dan nilai maksimum 0,57. Rata-rata proporsi komisaris independen adalah 0,37 yang berarti proporsi komisaris independen pada perusahaan yang menjadi sampel relatif besar. Kepemilikan institusional (INST_INV) memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 18,75 dan 99,00. Nilai rata-ratanya adalah sebesar 59,65 yang berarti kepemilikan saham oleh investor institusional pada perusahaan sampel yang relatif tinggi hampir mendekati 60 persen. Ukuran dewan komisaris (TOT_KOM) memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 13. Rata-rata ukuran dewan komisaris sebesar 6,64 yang berarti jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan yang disampel relatif besar. Variabel independen lainnya yang merupakan proksi dari struktur *corporate governance* adalah proporsi komisaris perempuan (P_KOM) yang memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,50. Rata-rata proporsi dari komisaris perempuan adalah sebesar 0,06 yang berarti tidak banyak atau bahkan relatif kecil anggota dewan komisaris perempuan dalam jajaran dewan komisaris pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Variabel kontrol dalam penelitian adalah ukuran perusahaan yang diukur menggunakan tiga pengukuran yaitu total asset (TOT_ASST), kapitalisasi pasar (MKT_CAP) dan *operating revenue* (OP_REV). Total asset memiliki nilai minimum dan nilai maksimum masing-masing sebesar 1.835 dan 85.938. Rata-ratanya adalah 22.578,83 dan standar deviasinya adalah 21.169,32. Kapitalisasi pasar memiliki nilai minimum dan nilai maksimum masing-masing sebesar 1.044 dan 94.015. Nilai rata-rata sebesar 30.180,09 dan standar deviasi sebesar 26.143,11. Ukuran dari variabel kontrol ukuran perusahaan yang lain adalah *operating revenue* memiliki nilai minimum sebesar 1.621 dan nilai maksimum sebesar 43.517. Rata-ratanya sebesar 14.510,51 dan standar deviasi sebesar 10.746,58. Variabel kontrol lainnya yaitu profitabilitas (PROP) yang diukur menggunakan ROA mempunyai nilai minimum dan nilai maksimum masing-masing sebesar -0,09 dan 0,46. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah masing-masing sebesar 0,11 dan 0,11.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian terhadap asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Setelah memenuhi uji asumsi klasik, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji model persamaan secara parsial terhadap masing-masing variabel independen dan variabel kontrol menggunakan alat statistik regresi *Ordinary Least Square*. Hasil pengujian model regresi disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Nilai Signifikansi (=10%)
KOM_IND	0,29	,078*
INST_INV	-0,18	,247
TOT_KOM	0,13	,446
P_KOM	-0,45	,003*
TOT_ASST	1,21	,016*
MKT_CAP	0,29	,093*
OP_REV	-1,34	,009*
PROP	-0,26	,096*

Keterangan: *) Signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas, Nilai signifikansi variabel KOM_IND dengan variabel dependen ENV_DISC adalah sebesar 0,08, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,10 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi pengungkapan pelaporan lingkungan (ENV_DISC). Dengan demikian **hipotesis 1 diterima**. Hasil ini mendukung penelitian De Villiers *et al.* (2009), Chen dan Jaggi, (2000) dan Carter *et al.*, (2003). Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki direksi yang lebih independen, karena komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kinerjanya lebih luas. Nilai signifikansi variabel INST_INV dengan variabel dependen ENV_DISC adalah sebesar 0,25, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi pengungkapan pelaporan lingkungan (ENV_DISC). Dengan demikian **hipotesis 2 ditolak**. Hasil ini konsisten dengan penelitian Halme dan Huse (1997) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak terdapat hubungan dengan pelaporan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besarnya saham yang dimiliki investor institusional tidak akan mempengaruhi kinerja manajemen perusahaan dalam melakukan pelaporan lingkungan perusahaan.

Nilai signifikansi variabel TOT_KOM dengan variabel dependen ENV_DISC adalah sebesar 0,44, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi pengungkapan pelaporan lingkungan (ENV_DISC). Dengan demikian **hipotesis 3 ditolak**. Hasil ini konsisten dengan penelitian Halme dan Huse (1997) dan Ienciu Ionel – Alin *et al.* (2012) bahwa tidak terdapat hubungan antara ukuran dewan dengan tingkat pelaporan lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa besar atau pun kecil jumlah dewan komisaris yang ada pada jajaran dewan komisaris tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi pelaporan lingkungan perusahaan. Nilai signifikansi variabel P_KOM dengan variabel dependen ENV_DISC adalah sebesar 0,00, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti dan berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi pengungkapan pelaporan lingkungan (ENV_DISC). Dengan demikian **hipotesis 4 ditolak**. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya komisaris perempuan dalam jajaran dewan komisaris belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan pelaporan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan tabel diatas, koefisien regresi variabel kontrol TOT_ASST, MKT_CAP, dan OP_REV yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan (*firm size*) masing-masing memiliki signifikansi sebesar 0,01, 0,09 dan 0,01. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan lingkungan. Koefisien regresi variabel PROP dengan signifikansi 0,096. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pelaporan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 (H1) dibuktikan bahwa proporsi komisaris non-eksekutif independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa komisaris independen akan lebih meningkatkan transparansi dewan dalam perusahaan dan secara sukarela akan mengungkapkan informasi tambahan. Hasil pengujian hipotesis dua (H2) dibuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pelaporan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa seberapa pun besarnya saham yang dimiliki oleh institusi tidak akan berpengaruh terhadap pelaporan lingkungan perusahaan. Hasil pengujian hipotesis tiga (H3) dibuktikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pelaporan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa seberapa pun besarnya jumlah dewan komisaris dalam jajaran dewan tidak akan berpengaruh terhadap pelaporan lingkungan perusahaan. Hasil pengujian hipotesis empat (H4) dibuktikan bahwa proporsi komisaris perempuan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan pelaporan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya komisaris perempuan dalam jajaran dewan komisaris belum tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan pengungkapan pelaporan lingkungan perusahaan.



Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah perusahaan di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena kurangnya perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Di Indonesia, laporan keberlanjutan yang dibuat oleh perusahaan yang terdaftar di BEI sifatnya masih *voluntary* atau sukarela. Penelitian ini masih menggunkan indeks GRI 3.1 sementara saat ini telah ada indeks GRI 4, karena belum banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan atau menerapkan indeks GRI 4 untuk pelaporan CSR mereka.

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu Pemerintahan sebagai regulator sebaiknya dapat membuat peraturan agar perusahaan-perusahaan *go public* yang telah terdaftar di BEI untuk dapat membuat laporan keberlanjutan. Sehingga perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keberlanjutan ini, karena laporan ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tempatnya beroperasi. Bagi perusahaan sebaiknya lebih terbuka dalam melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaannya kepada para pemangku kepentingan. Selain itu perusahaan juga harus meningkatkan kinerja komisaris serta manajemen sebagai bagian dari struktur GCG agar keputusan yang diambil lebih tepat terutama keputusan mengenai pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini akan membuat kinerja perusahaan semakin meningkat dimata para pemangku kepentingan. Bagi penelitian mendatang sebaiknya meneliti perusahaan yang telah menerapkan indeks GRI yang terbaru.

REFERENSI

- Adams, C. and Zutshi, A. 2004. *Corporate Social Responsibility: Why Business Should Act Responsibly And Be Accountable*. Australian Accounting Review, Vol. 14, pp. 31-40.
- Adams, R.B. and Ferreira, D. 2004. *Gender Diversity In The Boardroom''*, ECGI Working Paper Series In Finance. No. 58, European Corporate Governance Institute (ECGI), Brussels.
- Cahaya, F.R., Porter, S., Tower, G. and Brown, A. 2009. *Labour Practices And Decent Work Disclosures In Indonesia*. paper presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- Chen, C.J. and Jaggi, B. .2000. *Association Between Independent Non-Executive Directors, Family Control And financial Disclosure In Hong Kong*. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9, pp. 285-310.
- Cho, C.H. and Patten, D.M. 2007. *The Role Of Environmental Disclosures as Toolsoflegitimacy: A Research Note*. Accounting, Organizations and Society, Vol. 32, pp. 639-47.
- Deegan, C. and Gordon, B. 1996. *A Study Of The Environmental Disclosure Practices Of Australian Corporations*. Accounting & Business Research, Vol. 6, pp. 187-200.
- de Villiers, C. and van Staden, C. 2009. *Good, Bad And Crisis: How Much And Where They Disclose Environmental Information*. Paper Presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- de Villiers, C., Naiker, V. and van Staden, C. 2009. *Good Corporate Governance Makes For Good Environmental Performance*. Paper Presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- Donnelly, R. and Mulcahy, M. 2008. *Board Structure, Ownership, And Voluntary Disclosure In Ireland*. Corporate Governance, Vol. 16, pp. 416-29.
- Gibson, K. and O'Donovan, G. 2007. *Corporate Governance And Environmental Reporting: An Australian Study*. Corporate Governance, Vol. 15, pp. 944-56.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2006. *Sustainability Reporting Guidelines*. www.globalreporting.org/guidelines/062006guidelines.asp. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.



- Habib, A. and Jiang, H. 2009. *The Impact Of Ownership Concentration On Voluntary Disclosure Practices In New Zealan.*, Paper Presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- Halme, M. and Huse, M. 1997. *The Influence Of Corporate Governance, Industry And Country Factors On Environmental Reporting.* Scandinavian Journal of Management, Vol. 13, pp. 137-57.
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). 2010. www.beritabumi.or.id. Diakses tanggal 13 Maret 2015.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. *Theory Of The firm: Managerial Behaviour, Agency Costs And Ownership Structure.* Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4, pp. 305-65.
- Kathyayini, et al. 2012. *Corporate Social and Environmental Reporting: an Australian Study.* Emerald Group Pubishing Limited Vol. 12 No. 2 hal 143-163.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.* Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Patten, D.M. 1991. *Exposure, Legitimacy And Social Disclosure.* Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 10, pp. 297-309.
- Shan, Y.G. 2009. *Related Party Disclosures In China: Influences Of Factors Identified From Agency, Legitimacy, And Signalling Theories.* Paper Presented at the Symposium SA, February 2009.

